

**PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO)**

Dwi Oktafia Ariyanti¹, Wiwik Fitria Ningsih², Dra. Ratih Rakhmawati³

¹ Akuntansi, Mahasiswa Institut Teknologi Dan Sains Mandala
email: dwioktavia651@gmail.com

² Akuntansi, Dosen Institut Teknologi Dan Sains Mandala
email: wiwik@itsm.ac.id

³ Akuntansi, Dosen Institut Teknologi Dan Sains Mandala
email: ratih@stie-mandala.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of the implementation of Government Accounting Standards, Good Governance, Accountability, and Transparency on the Quality of Regional Financial Statements (Case Study on the Regional Finance and Assets Agency of Situbondo Regency). The population used in this study was employees of the Government office of the Regional Finance and Assets Agency of Situbondo Regency which amounted to 109 employees. The sample used amounted to 60 respondents who were BKAD employees who met several criteria. The type of research used is using quantitative descriptive and the method used is a quantitative method where the method whose data uses data analysis is number (numeric) using statistical methods. The data collection method used is literature study or documentation and distribution of questionnaires and the results of the questionnaires received again will be processed. The questionnaire data will be analyzed and processed using SPSS program version 25. The tests used are data quality data tests (validity tests and reliability tests), classical assumption tests (normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests), multiple linear regression analysis tests (t tests) and simultaneous tests (F tests). The results showed that government accounting standards partially had a significant effect on the quality of regional financial statements, good governance partially did not have a significant effect on the quality of regional financial statements, partial accountability had a significant effect on the quality of regional financial statements, partial transparency had a significant effect on the quality of regional financial statements. Simultaneously, government accounting standards, good governance, accountability and transparency have a significant effect on the quality of regional financial statements.

Keywords: *Government Accounting Standards, Good Governance, Accountability, and Transparency.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya Era Reformasi dalam pelaksanaan

kebijakan pemerintahan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing

di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan payung hukum Pemerintah daerah yang antara lain adalah mengenai pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan Negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah salah satu yang berkepentingan dalam menguatkan tata kelola keuangan daerah berbasis pada kinerja laporan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Situbondo menerima APBD yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga diperlukan laporan keuangan yang handal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Kamis (25/5). Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Situbondo, Karna Suswandi di kantor

BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Menurut (Hidayati, 2016) mengemukakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai akibat dari buruknya pengelolaan barang milik daerah, karena ketidak mampuan untuk mencapai tata kelola aset atau barang pemerintah daerah secara baik. Beberapa daerah juga mengalami penurunan Opini dari Wajar Tanpa Pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian atau tidak Memberi Pendapat (Ferdianus, 2013). Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mampu mempertahankan pencapaian opini WTP selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2021. Namun masih banyak oknum pemerintahan yang menyalahgunakan anggaran pemerintah seperti isu pengembalian alokasi dana desa dari kepala desa kalisari dan korupsi uk/ukl DLH. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo Nauli Rachim Siregar mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara itu setelah pihaknya menerima laporan hasil pemeriksaan (LPH) temuan inspektorat pada tanggal 8 Februari 2023 dan melakukan Penyelidikan. “jadi, ada 12 desa yang kami lakukan penyelidikan, dan pada hari ini baru satu desa yang mengembalikan keuangan negara lebih dari Rp.1,2 miliar,”. Ujar Kajari Nauli dalam konferensi pers di Aula Kejaksaan Negeri Situbondo, Kamis. Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur, mengungkapkan kerugian keuangan

negara pada kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat sekitar Rp. 676 juta. Sebelumnya, kejaksan menyebutkan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi tersebut sekitar Rp.800 juta yang merupakan sangkaan penyidik. “kerugian keuangan negara sudah keluar dari perhitungan Inspektorat. Perhitungannya total loss karena memang pagu anggaran Rp.867 juta. Dari pagu itu ada pajak sehingga setelah dikurangi pajak, nilai kerugian (keuangan negara) menjadi lebih Rp.676 juta,” kata kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nauli Rahim Siregar dalam konferensi pers di Situbondo, Jumat.

Meski sudah relatif baik, namun masih dibutuhkan perhatian lebih besar lagi, salah satunya pengelolaan aset daerah dan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang ada guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu

pemerintahan di masa yang akan datang.

2. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah(Pemerintah, 2014). Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (KSAP,2015). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Good Governance merupakan Perkembangan teknologi dan ekonomisebagai acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau sering. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam

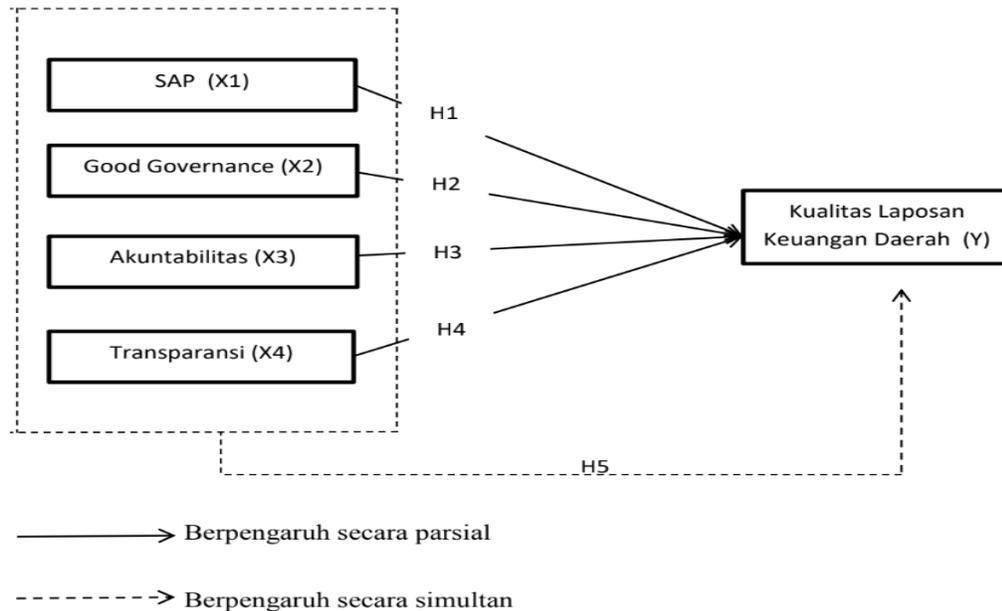
menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). (Mahmudi, 2010).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo,2010). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut antara lain, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berikut merupakan kerangka penelitian ini



Berdasarkan gambar diatas menyebutkan bahwa hipotesis yaitu adanya pengaruh secara parsial maupun simultan antara standart akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, good governance, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Menurut (Sugiyono, 2017) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Dinyatakan sementara karena perumusan yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data. hipotesis penelitian tersebut diantaranya:

2.4.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut (Indra Bastian, 2010) menjelaskan pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut : “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rukmi Juwita, 2013) dalam penelitian yang di lakukan menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka

H1 : diduga Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut (Rukmi Juwita 2013) Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana Investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azlim dkk, 2012) menyatakan bahwa Penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD. Maka

H2 : diduga penerapan Good Governance berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelitian (Ninti sa'adah 2016) pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintahan kabupaten Blitar sudah terwujud. Terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk mempublikasi proses dan dokumentasi pelaksanaan

penganggaran Pemerintahan Kabupaten Blitar, namun hasil pertanggungjawaban anggaran kabupaten Blitar. Maka

H3 : diduga penerapan Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.4.4 Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Menurut (Mahmudi, 2016) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Dari hasil pemeriksaan BPK masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perwujudan transparansi informasi anggaran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui terbukanya informasi tentang anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Maka

H4 : diduga penerapan Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.4.5 Pengaruh penerapan Standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Ditinjau dari seluruh penelitian terdahulu diperoleh bahwa variabel SAP, Good Governance, Akuntabilitas

dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka

H5 : diduga SAP, Good Governance, Akuntabilitas, Dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian yang digunakan adalah Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. Pb. Sudirman No. 1, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. BKAD merupakan Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam membantu tugas bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berjumlah 109 pegawai dan Sampel berjumlah 60 orang. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini menjelaskan peristiwa, situasi dan keadaan di lapangan secara akurat dan sistematis. Sedangkan

metode kuantitatif merupakan metode yang datanya menggunakan analisis data yaitu angka (numerik) dengan memakai metode statistika serta memakai pengujian hipotesis sehingga data yang ada merupakan data yang valid. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisisioner dan olah data menggunakan SPSS versi 25. Pengujian yang digunakan adalah uji data kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji parsial dan uji simultan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara non probability sampling (purposive sampling) dimana sampel dipilih dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Berdasarkan populasi yang diatas kriteria sampel ini yaitu para pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Sampel berjumlah 60 orang. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuisisioner kemudian dilakukan olah data menggunakan SPSS versi 25. Jawaban yang didapat dari responden berjumlah 60 orang.

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator	r tabel 0,05 (60)	r hitung	Signifikansi	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X)				
X1.1	0,254	0,843	0,000	Valid
X1.2	0,254	0,743	0,000	Valid
X1.3	0,254	0,824	0,000	Valid
Good Governance (X2)				
X2.1	0,254	0,779	0,000	Valid
X2.2	0,254	0,743	0,000	Valid
X2.3	0,254	0,548	0,000	Valid
X2.4	0,254	0,833	0,000	Valid
Akuntabilitas (X3)				
X3.1	0,254	0,792	0,000	Valid
X3.2	0,254	0,817	0,000	Valid
X3.3	0,254	0,830	0,000	Valid
Transparansi (X4)				
X4.1	0,254	0,850	0,000	Valid
X4.2	0,254	0,877	0,000	Valid
X4.3	0,254	0,725	0,000	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)				
Y.1	0,254	0,762	0,000	Valid
Y.2	0,254	0,884	0,000	Valid
Y.3	0,254	0,868	0,000	Valid
Y.4	0,254	0,845	0,000	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS

Pada tabel 4.10 hasil uji validitas diatas memperlihatkan bahwa nilai r_{hitung} setiap indikator variabel standar akuntansi pemerintah good governance, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan lebih besar dibanding nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan demikian

indikator atau kuisisioner yang digunakan oleh masing-masing variabel standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan dapat dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Uji Reabilitas

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpa	Reabilitas	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,60	0,710	Reabilitas diterima
Good Governance (X2)	0,60	0,707	Reabilitas diterima
Akuntabilitas (X3)	0,60	0,732	Reabilitas diterima
Transparansi (X4)	0,60	0,753	Reabilitas diterima
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,60	0,860	Reabilitas diterima

Sumber: Hasil Output SPSS

Data hasil pengolahan SPSS semua variabel dari uji reabilitas menunjukkan jumlah nilai lebih dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel atau konsisten. Hal ini sesuai dengan **Uji Normalitas**

pernyataan (Ghozali, 2006), apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka kusioner atau angket dapat dinyatakan reliabel atau konsisten.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,53100075
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,048
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji K-S ditemukan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > U

0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

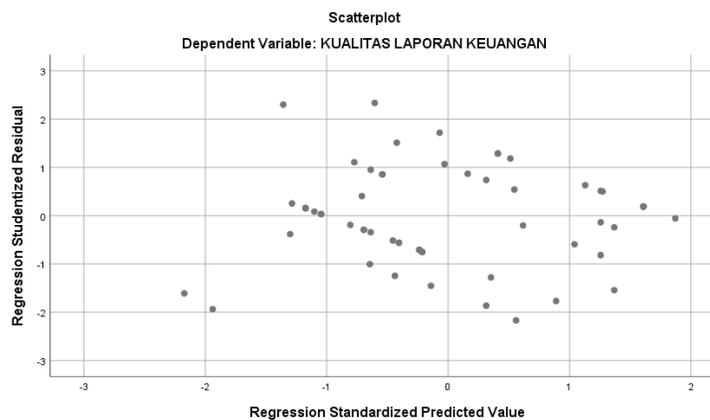
Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sedangkan menurut (Ghozali, 2013) nilai cutoff yang umumnya

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance kurang dari 10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10, maka pada data semua variabel tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik berada diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y secara acak dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini sesuai **Uji Regresi Linear Berganda**

dengan pernyataan menurut (Ghozali, 2013) apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047		
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026	,668	1,497
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114	,590	1,696
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003	,611	1,637
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008	,679	1,473

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,098 + 0,453X_1 - 0,238X_2 + 0,498X_3 + 0,339X_4$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. α = Nilai Konstanta sebesar 5,098 menyatakan bahwa apabila variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Akuntabilitas, Dan Transparansi sama dengan nol dapat dinilai konstan, maka Kualitas

Laporan Keuangan Daerah naik sebesar 5,098.

2. Nilai koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintah (X1) sebesar 0,453 menyatakan bahwa apabila variabel Standar Akuntansi Pemerintah meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,453
3. Nilai koefisien regresi Good Governance (X2) sebesar -0,238 menyatakan bahwa apabila variabel Good Governance meningkat satu maka

- Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,238.
4. Nilai koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintah (X3) sebesar 0,498 menyatakan bahwa apabila variabel Akuntabilitas meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,498.
 5. Nilai koefisien regresi Transparansi (X4) sebesar 0,339 menyatakan bahwa apabila variabel Transparansi meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,339.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,098	2,505		2,036	,047
	SAP	,453	,198	,277	2,287	,026
	GOOD GOVERNANCE	-,238	,148	-,207	-1,605	,114
	AKUNTABILITAS	,498	,159	,397	3,133	,003
	TRANSPARANSI	,339	,122	,333	2,771	,008

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) adalah sebesar 0,026, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 dan t_{hitung} (2,287) lebih besar dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_1 diterima.
2. Nilai signifikansi variabel Good Governance (X2) adalah sebesar 0,114, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada 0,05 dan t_{hitung} (-1,605) lebih kecil dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Good Governance (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_2 ditolak.

3. Nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (X3) adalah sebesar 0,003, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada 0,05 dan t_{hitung} (3,133) lebih besar dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_3 diterima.
4. Nilai signifikansi variabel Transparansi (X4) adalah sebesar 0,008, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 dan t_{hitung} (2,771) lebih besar dari t_{tabel} (2,004) hasil tersebut menunjukkan bahwa Transparansi (X4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_4 diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118,439	4	29,610	11,776	,000 ^b
	Residual	138,294	55	2,514		
	Total	256,733	59			

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, SAP, AKUNTABILITAS, GOOD GOVERNANCE

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan Uji F pada tabel diatas, di temukan nilai F_{hitung} sebesar 11,776 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F_{hitung} (11,776) lebih besar dibandingkan F_{tabel} (2,773), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Daerah atau dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Akuntabilitas, dan Transparansi, secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga membuktikan bahwa H_5 diterima.

PEMBAHASAN

4.4.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_1 diterima. hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sudah di laksanakan dalam

membuat laporan keuangan daerah. Dalam pembuatan laporan keuangan daerah menggunakan Standar akuntansi pemerintah yaitu basis akrual untuk mengakui aset dan basis kas untuk mengakui pendapatan LRA. Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah memahami PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

4.4.2 Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_2 ditolak, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Good Governance tidak berpengaruh juga karena dalam penilaian kualitasnya laporan keuangan daerah tidak bergantung pada good governance, jadi maksudnya adalah tata kelola pemerintahan tersebut sudah bagus namun bukan menjadi tolak ukur dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Karena dengan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada maka akan membuat laporan keuangan tersebut berkualitas.

4.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_3 diterima, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik dalam membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas. Akuntabilitas keuangan daerah akan memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Situbondo kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi.

4.4.4 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi (X4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_4 diterima, hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Transparansi sudah berpengaruh dengan baik dalam membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas. Transparansi kebijakan publik memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4.4.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa H_5 diterima. Artinya dalam penerapan standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas, dan transparansi sudah dilakukan dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dalam pembuatan laporan keuangan daerah memang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan juga harus dilaporkan pada *stakeholder* seperti salah satunya kepada masyarakat secara transparans.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo)”. yang kemudian menemukan hasil dan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintah (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_1 diterima. Dapat dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sudah diterapkan dan dipahami dalam pembuatan laporan keuangan daerah.
2. Good Governance (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_2 ditolak. Dapat dinyatakan bahwa Good Governance tidak berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
3. Akuntabilitas (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_3 diterima. Dapat dinyatakan bahwa penerapan Akuntabilitas sudah diterapkan dan dijalankan dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

4. Transparansi (X4) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_4 diterima. Dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan daerah sudah dilakukan secara transparansi kepada masyarakat untuk pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

5. Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Good Governance (X2), Akuntabilitas (X3), dan Transparansi (X4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Sehingga membuktikan bahwa H_5 diterima. Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas, dan transparansi sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk para pegawai BKAD Kabupaten Situbondo diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah, good governance, akuntabilitas, dan transparansi

dalam pembuatan laporan keuangan daerah yang baik, berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang ada serta memberikan informasi laporan keuangan untuk masyarakat secara transparan.

2. Untuk para akademisi mahasiswa, maupun peneliti agar terus mengkaji dan mengembangkan penelitian yang nantinya akan dilakukan di masa yang akan datang. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel sesuai kriteria yang dapat memahami laporan keuangan daerah.

REFERENSI

- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.
- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi* ISSN, 2302, 164.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

- Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 5(1), 22-32.
- Safriidha, M. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Karimah, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1).
- Botutihe, T. H. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Skripsi, 1(241408102).
- Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 5(10), 117-126.
- Abdullah, M. W., & Rafid, R. Z. (2017). Pemoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3(2).
- Stanbury, W. T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute.
- <http://repository.stei.ac.id/5347/4/III.pdf>
- Komang, A. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan

Kabupaten Buleleng Provinsi
Bali. *Singaraja: e-Journal SI Ak*
Universitas Pendidikan Ganesha

https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/18924_17_A_BSTRAK.pdf

Van Zyl, A. J. (2007). A knowledge gap analysis on multi-scale predictive ability for agriculturally derived sediments under South African conditions. *Water science and technology*, 55(3), 107-114.

Yani, J. A. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. *Diktat Kuliah Psikometri*. Fakultas Psikologi Universitas.

https://kc.umh.ac.id/15818/5/BAB_III.pdf